

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan dukungan teknis, administrasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan secara fungsional oleh Inspektorat I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian tersebut menyatakan bahwa Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

## **B. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat I terdiri dari :

#### **1. Subbagian Program dan Tata Usaha**

Subbagian Program dan Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

Subbagian Program dan Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggung jawab kepada Inspektur I.

#### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.**

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat  
Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

I



## BAB II

### RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

#### A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I.**

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2020 semula memperoleh anggaran sebesar Rp 3.400.000.000,-. Pada triwulan II Inspektorat I mengalami revisi pemotongan anggaran yang diakibatkan adanya pandemi covid 19 secara nasional, dengan anggaran menjadi **Rp 1.715.273.000,-**. Pada tahun 2020 terdapat perubahan target pada kegiatan monev menjadi 1 kegiatan, yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat I Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	7 Laporan	
2.	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	60 Laporan	
3.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	
4.	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	
5.	Layanan Audit Internal Inspektorat I	1 Layanan	

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut alokasi anggaran kegiatan Inspektorat I terdiri dari:

Tabel2.Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2019

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	VOLUME	JUMLAH (Rp,-)
<b>1841</b>	<b>Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I</b>		<b>1.715.273.000</b>
<b>1841.001</b>	<b>Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>202.300.000</b>
1841.001.051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		24.760.000
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I		21.380.000
B	Penyusunan Anggaran Inspektorat I Tahun 2021		3.380.000
1841.001.052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas		6.760.000
A	Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya		3.380.000
B	Koordinasi dan Penyusunan LAKIP Inspektorat I		3.880.000
1841.001.053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya		170.780.000
A	Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I		170.780.000
<b>1841.002</b>	<b>Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I</b>	<b>60 Laporan</b>	<b>587.170.000</b>
1841.002.051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		586.170.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu		36.380.000
B	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (LK-BMN)		527.470.000
C	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelopran Keuangan (PIPK)		22.320.000

1841.002.052	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I		1.000.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN		1.000.000
<b>1841.003</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1.000.000</b>
1841.003.051	Monev SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		1.000.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP		1.000.000
<b>1841.004</b>	<b>Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>65.838.000</b>
1841.004.052	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi		65.838.000
A	Koordinasi Pendampingan/Pengawasan Kegiatan Berisiko Tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja		3.000.000
B	Pelaksanaan Pendampingan/Pengawasan Kegiatan Berisiko Tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Kerja/Tenaga Pendidik)		17.190.000
C	Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Kinerja oleh Pimpinan		38.888.000
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko		6.760.000
<b>1841.965</b>	<b>Layanan Audit Internal</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>856.965.000</b>
1841.965.052	Pelaksanaan Audit Internal		837.209.000
A	Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri		21.730.000
B	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri		815.479.000
1841.003.053	Pelaksanaan Audit Khusus		3.740.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu		3.740.000
1841.003.054	Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP		8.516.000

A	Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit		8.516.000
1841.003.055	Reviu Perencanaan Anggaran		7.500.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL		7.500.000

## B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	2,8%
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IKU	5%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	3,6
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar	IK	75%



	Internal yang Efektif	pelaksanaan pengawasan		
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%

## BAB III

### PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

#### A. Hasil yang Telah Dicapai

Total anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.715.273.000,- terdiri dari:

Tabel 4. Anggaran Inspektorat I Tahun 2020

No.	Kode	Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah (Rp,-)
	<b>1841</b>	<b>Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I</b>	<b>1.715.273.000</b>
1.	1841.001	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	202.300.000
2.	1841.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	587.170.000
3.	1841.003	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000
4.	1841.004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	65.838.000
5.	1841.965	Layanan Audit Internal	856.965.000

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sesuai aplikasi PP39 telah mencapai 57,05% atau sebesar Rp. 978.563.247,- dari target 62,37%, sedangkan realisasi fisik sebesar 45,72% dari target fisik sebesar 66,08%.

Sesuai dengan aplikasi *Monitoring* yang bersumber dari aplikasi Analisa Laporan Kegiatan Internal (ALKI), realisasi anggaran Inspektorat

I pada Triwulan II telah mencapai 58,04% atau sebesar Rp.955.544.449,- dari target 69,04%, sedangkan dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) realisasi Inspektorat I pada Triwulan II telah mencapai 55,45% atau sebesar Rp.951.201.168,-

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena belum diinput oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal, karena ada SP2D belum terbit.

Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* ALK Ibarum mencapai 45,75% dari target sebesar 72,30%. Hasil ini masih belum memenuhi target karena belum semua kegiatan yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Triwulan II dapat dilaksanakan, Penyebab utama yaitu pandemik wabah virus corona di seluruh Indonesia, sehingga terbit Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebab Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, yang berisi antara lain perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sampai dengan tanggal 21 April 2020. Pelaksanaan kegiatan ditargetkan dapat diselesaikan pada triwulan selanjutnya.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	202.300.000	0,99	35.038.360	17,32	28,90	78.229.410	38,67	71.10	124.070.590	61,33
2 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	587.170.000	0	22.429.894	3,82	83,03	581.591.885	99,05	16.97	5.578.115	0,95
3 Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000	0	0	0	0	0	0	100	3.000.000	100,00
4 Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	65.838.000	0	19.981.833	30,35	3,47	37.020.707	56,23	96,53	2.284.579	3,47
5 Layanan Audit Internal	856.965.000	0,20	133.428.049	15,57	27,53	281.684.396	32,87	72.47	757.299.971	88,37
<b>Total</b>	<b>1.715.273.000</b>	<b>0,22</b>	<b>210.807.052</b>	<b>12,29</b>	<b>45,72</b>	<b>978.563.247</b>	<b>57,05</b>	<b>54,28</b>	<b>736.709.754</b>	<b>42,95</b>

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi – *Monitoring*

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran	Triwulan II			Sisa Anggaran	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Jumlah (Rp,-)	%
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	202.300.000	28,90	78.229.410	38,67	124.070.590	61,33
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	587.170.000	83,03	581.591.885	99,05	5.578.115	0,95
3	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100,00
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	65.838.000	3,47	37.020.707	56,23	2.284.579	3,47
5	Layanan Audit Internal	856.965.000	27,53	281.684.396	32,87	757.299.971	88,37
<b>Total</b>		<b>1.715.273.000</b>	<b>45,72</b>	<b>978.563.247</b>	<b>57,28</b>	<b>736.709.754</b>	<b>42,95</b>

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	2,8%	Belum dapat diukur	BPK belum selesai melakukan pemeriksaan
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IKU	5%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	3,6	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	25%	Satker yang diaudit telah memenuhi standar

		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%	Belum dapat diukur	Koordinasi dengan Set.Itjen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%	50%	Reviu LKMBN, Reviu PIPK, Audit Pusat (Set.Itjen) dan Audit Vertikal BPSDMI8 Satker
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%	50%	Reviu dan Audit Pusat (Set.Itjen) dan Audit Vertikal 8 Satker

Sesuai data di atas, capaian kinerja untuk sasaran **Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I  
Indikator ini belum dapat diukur karena sampai dengan Triwulan II, BPK belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Kementerian Perindustrian. Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.
2. Indikator kinerja; Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I  
Pada indikator kinerja ini, Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.
3. Indikator kinerja; Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti.  
Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.

4. Indikator kinerja; Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I.

Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.

Capaian kinerja untuk sasaran **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Nilai SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I

Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan berikutnya.

Capaian kinerja untuk sasaran **Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pada kegiatan pada triwulan II merupakan kumulatif dari kegiatan triwulan I. Pelaksanaan audit dilakukan pada 1 (satu) satker Pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan 8 satker vertikal yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek ATI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar. Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar, capaian indikator ini sebanyak 15,30%. Kegiatan audit pada triwulan terkendala dengan pademik corona secara nasional, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan berikutnya direncanakan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja; Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Indikator ini belum dapat diukur, kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, sedangkan Inspektorat hanya berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Capaian kinerja untuk sasaran **Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien** sebagai berikut:



1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Pada Triwulan I, sesuai PKPT kegiatan yang dilaksanakan yaitu a) Audit kinerja; Pusat (Sekjen) dan 8 satker vertikal yaitu Poltek STTT Bandung, Poltek AKA Bogor, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, BDI Makassar, Poltek ATI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar, b) Pra Reviu PIPK ; satker Pusat (Sekjen dan BPSDMI) dan 3 satker vertikal yaitu Poltek STMI Jakarta, Poltek APP Jakarta dan BDI Jakarta}, c) Reviu LKBMN tahun 2019 telah dilaksanakan di 31 Satker terdiri dari 2 Satker Pusat dan 29 satker vertikal BPSDMI yaitu 13 Pendidikan Vokasi ,9 SMK dan 7 BDI cakupan tugas Inspektorat I.

Kegiatan audit telah dilaksanakan sebanyak 8 Satker atau sebesar 25% dan Reviu tahun 2019 telah dilaksanakan pada 31 satker cakupan tugas Inspektorat I sebesar 50%

Capaian indikator kinerja secara keseluruhan sebanyak 50%, dan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Pada indikator kinerja ini, kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Reviu PIPK dan LKBMN dan Audit kinerja dengan penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya oleh dengan capaian kinerja sebanyak 50%, kegiatan masih berlanjut pada triwulan berikutnya.

### **C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan ke satker vertikal mengalami penundaan, karena adanya wabah corona virus secara pandemik ke seluruh Indonesia.

2. Sampai saat terakhir laporan ini dibuat, terdapat perbedaan dari bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal karena SP2D belum terbit.

#### **D. Langkah Tindak Lanjut**

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan I untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realisasi anggaran sesungguhnya.
2. Perlu meningkatkan koordinasi internal dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan pada awal tahun.
3. Perlu penjadwalan dan penganggaran kembali setelah situasi kondusif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2020 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, realisasi anggaran Inspektorat I berdasarkan aplikasi PP39 sebesar 57,05% atau senilai Rp.978.563.247,- dari target 62,37%, sementara realisasi fisik kegiatan Inspektorat I masih mencapai 45,72% dari target sebesar 66,08%. Realisasi anggaran Inspektorat I berdasarkan aplikasi *e-Monitoring* ALKI sebesar 58,04% atau senilai Rp.955.544.449,- dari target 69,04% sedangkan dari aplikasi SAS realisasi Inspektorat I pada Triwulan II telah mencapai 55,45% atau sebesar Rp.951.201.168,-

Diharapkan pada Triwulan mendatang penyerapan anggaran dan kinerja fisik dapat ditingkatkan lebih baik, sehingga memberikan dampak yang positif untuk *stakeholder* di lingkungan Inspektorat I.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun dapat diselesaikan dengan baik. Upaya terhadap tingkat capaian, baik realisasi fisik maupun keuangan selalu dioptimalkan dengan mengacu kepada target yang telah ditetapkan.

#### **B. Saran**

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2020  
untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**TRIWULAN– II**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**INSPEKTORAT I**